OMBUDSMAN NTT DUKUNG GUBERNUR LAISKODAT BERHENTIKAN KADIS BERKINERJA BURUK

Kamis, 07 April 2022 - Veronica Rofiana Edon

KUPANG,SELATANINDONESIA.COMÂ - Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton mendukung penuh sikap tegas Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang mencopot tiga orang Kepala Dinas yang diketahui memiliki kinerja yang buruk.

Kendati baru mengetahui score kinerja untuk masing-masing indikator, Beda Daton menegaskan, mendukung sikap tegas tersebut. "Intinya apa yang dilakukan Gubernur ini wajib kita dukung. Karena mengukur kinerja berdasarkan indikator yang terukur," sebut Beda Daton kepada SelatanIndonesia.com, Rabu (6/4/2022).

Disebutkan Beda Daton, semua Kepala Dinas dan Pimpinan OPD menyanggupi saat penandatanganan perjanjian kinerja disertai target. "Lalu mereka juga sudah tanda tangan Surat Pengunduran Diri jika target tidak tercapai. Sebab jika pakai aturan pemberhentian pejabat eselon II, maka ribet dan panjang sampai ke KASN," ujarnya.

Menurut dia, dengan menggunakan format Pengunduran Diri maka bisa dilakukan dengan cara menggantikan dengan pejabat lain jika tidak bisa mencapai target. "Ini memang hal yang tidak biasa dilakukan kepala daerah karena beresiko ke konstituen. Ini langkah berani dan hemat saya, reward dan punishment ini sangat penting untuk mendongkrak kinerja birokrasi. Tidak ada suka dan tidak suka serta pertimbangan SARA dan lain-lain," katanya.

Sebelumnya diberitakan, lantaran dinilia berkinerja buruk, tiga Kepala Dinas di lingkup Pemerintahan Provinsi NTT diistirahatkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, sejak Rabu (6/4/2022).

Ketiga Kepala Dinas yang diistirhatkan itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi, Kepala Dinas Sosial NTT Jamaludin Ahmad dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT Petrus Seran.

"Keputusan yang diambil bapak Gubernur NTT sebagai bentuk keseriusan membangun Provinsi NTT ke arah yang lebih baik dengan cara kerja keras," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT Benediktus Polo Maing seperti dilansir dari PosKupang.com, Selasa (5/4/2022).

Polo Maing membantah bahwa tiga kepala dinas tersebut tidak dinon job. Mereka menjalani cuti sebagai pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja. "Mereka istrahat sementara sambil menunggu penunjukan Plt agar melanjutkan sementara tugas tersebut," ujar Polo Maing.

Menurutnya, cuti tersebut diberikan selama 3 bulan namun jika ada progres, kemajuan atau pertimbangan lain dari gubernur maka bisa dikembalikan ke jabatan semula.

"Mereka cuti maksimal 3 bulan tapi pertimbangan lain dari pimpinan bisa 2 bulan saja atau 1 bulan saja sudah bisa kembali," tandasnya.

Inspektur pada Inspektorat Daerah (Irda) Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt. MM mengatalan, kinerja instansi pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. "Ini sebagai penjabaran dari visi, misi maupun strategi instansi tersebut yang mengindikasikan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan," sebut Ruth Laiskodat kepada wartawan di Kupang, Kamis (31/3/2022).

Disebutkan, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah daerah Provinsi NTT dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik, transparan dan berkualitas. "Dalam upaya mencapai Visi dan Misi serta pemenuhan target-target yang ada dalam RPJMD Provinsi NTT, maka Perangkat Daerah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2021 dengan Gubernur NTT meskipun di masa pandemi Covid-19 serta badai seroja beberapa waktu lalu. Perangkat deaerah tetap bersinergi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja," sebut Ruth Laiskodat.

Ia merincikan, dua komponen utama yang menjdi indikator penilaian adalah Kinerja Utama dengan indikator sasaran strategis yang ada dalam renstra Perangkat Daerah/IKU PD dengan bobot 40 serta Anggaran baik APBN dan APBD dengan bobot 20.

Sedangkan Kinerka Penunjang dengan rincian indicator diantaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa telah terkontrak 31 Maret dengan bobot 3,5, Nilai Pelaksanaan SAKIP minimal BB dengan bobot 10. Serta Nilai Pelaksanaan RB Minimal BB dengan bobot 10. "Juga telah menerapkan PPK online 100 persen dengan bobot 2. TLHP temuan dibawah 2019, administrasi 100 persen, non administrasi 90-100 persen dengan bobot 2. Serta TLHP temuan tahun 2019 ke atas harus 100 persen dengan bobot 2,5. Dan, Penyampain LKPD, LPPD, LKPJ dan LKIP paling lambat 31 Maret 2021 dengan bobot 3. Juga, telah bersertifikat manajemen ISO 9001:2015 dengan bobot 2. Dan, paling kurang menghasilkan 5 inovasi dengan bobot 5," jelasnya.

Dari hasil pembobotan itu diperoleh hasil bahwa terdapat 29 Perangkat Daerah mendapat nilai A (85,46 s/d 99,75) dengan predikat sangat berhasil. Dan, terdapat 9 Perangkat Daerah mendapat nilai B (78,23 s/d 84,42) dengan predikat berhasil. Serta terdapat 1 Perangkat Daerah yang mendapat nilai C (70,78) dengan predikat cukup berhasil.

Disebutkan, hasil penilaian ini tentu saja harus memberikan motivasi tersendiri bagi semua Perangkat Daerah untuk menjadi yang terbaik. "Bagi Perangkat Daerah dengan nilai yang bagus agar semakin ditingkatkan lagi kinerjanya, dan bagi perangkat daerah yang masih mendapat predikat C agar tetap berupaya meningkatkan kinerjanya," katanya.

Ruth menambahkan, terhadap hasil penilaian yang ada, Gubernur Lasikkodat meminta perhatian dari seluruh Kepala Perangkat Daerah agar meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian target-target RPJMD. "Memastikan indikator kinerja yang diperjanjilakan adalah indikator kinerja utama yang berorientasi hasi. Juga menyusun rencana Aksi untuk percepatan pencapaian target indikator kinerja dan dilaporkan secara periodik kepada Gubernur NTT," ujarnya.*****Laurens Leba Tukan**